

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer yang sangat cepat menjadi pendukung utama untuk memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi telah memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat sehingga dapat membuat kegiatan pelayanan yang dimanfaatkan sebagai ujung tombak dalam semua sektor pemerintahan dan mengarah kepada penguasaan dan penggunaan teknologi. Tidak dapat dipungkiri, peranan teknologi menjadi sangat dominan untuk perkembangan pelayanan dan diharapkan dapat mengatasi kelemahan - kelemahan dalam sistem informasi yang mengandalkan tenaga manusia. Sistem merupakan dasar pergerakan dalam seluruh kegiatan, keberadaan sistem dalam segala bidang sangat diperlukan sekali, tanpa adanya konsep dari sistem kegiatan atau pekerjaan akan berjalan tanpa kendali (Ridwan, 2021).

Sektor pelayanan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan pelayanan kini tertarik memanfaatkan layanan menggunakan website sebagai media dalam pengolahan data (Sopha, 2022)

Satuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan tempat pelayanan pengaduan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Trendi et al, 2022) . Dalam kegiatan operasionalnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengolah data pegawai sudah menggunakan komputer, namun

tidak didukung oleh program aplikasi data pegawai, data masih diarsip dalam bentuk lembaran kertas yang tercetak dan arsip disimpan di lemari arsip. Untuk mencetak laporan, di butuhkan waktu dan tenaga yang ekstra untuk menyatukan dan mencari lembaran-lembaran arsip. Selain itu data yang sama diinput berulang-ulang sehingga waktu dan tenaga tidak digunakan secara efisien.

Dari data pegawai penulis juga menemukan permasalahan lain yang di keluhkan saat pengolahan data berkala karyawan, masih menggunakan sistem yang manual yang masih dibuat pada buku besar sehingga membuat karyawan menjadi kesulitan apabila ada karyawan baru masuk maka harus mencatat kembali dengan nomor nip dan juga biodata lengkap yang baru.

Sistem informasi pengolahan pegawai dapat memudahkan efisiensi proses *flow* bisnis dalam keseharian maupun bulanan nantinya yang dibentuk pada laporan valid yang telah dilakukan pada masukan data selama pekerjaan beroperasi, sistem pada pamong praja merupakan sebuah hal yang mampu mendorong beberapa pekerjaan dalam pamong praja di fitur kepegawaian. Sehingga pendataan dan pertukaran informasi ketika pegawai baru dan *resign* dapat dianalisa dan diarsipitas melalui sistem terkoneksi.

Perkembangan teknologi membantu penyandingan kegiatan pamong praja dari pelayanan dan pembagian tugas secara detail yang bisa diambil datanya melalui sistem informasi pegawai ini dengan memanfaatkan klasifikasinya serta juga membantu kinerja *Human Resource* (HR) melakukan *sending* ke atasan sebagai bentuk kesigapan di bagian perkembangan teknologi juga di mudahkan pada skala penggajian dan pendataan profiler pribadi pegawai baik jenjang, gaji, rumah tangga, tunjangan, informasi, evaluasi dan lainnya.

Sehingga menerapkan perkembangan teknologi ini memakan kompleksitas atas waktu dan anggaran fisik seperti data *hardcase* bagi benefit keuangan perusahaan dan percepatan mencapai tujuan kinerja pekerjaan. Sehingga perkembangan awal dapat menjadi penentu nantinya untuk perkembangan lanjutan teknologi dibidang perusahaan jasa pelayanan masyarakat ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perancangan sistem informasi pengolahan data dapat membantu mempermudah dalam mengelola pendataan yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?
2. Bagaimana proses pengolahan data pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan cepat,akurat dan tepat?
3. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi yang dapat menyimpan data-data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang kedalam sebuah sistem yang aman?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis membuat suatu hipotesa yaitu dengan menggunakan suatu program sistem informasi dapat

mengetahui cara mengelola data pegawai yang dapat mengatasi kekurangan yang terjadi diantaranya:

1. Diduga dengan menerapkan sebuah perancangan sistem informasi pengolahan data pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat membantu mempermudah dalam mengelola pendataan yang ada di kantor kepegawaian.
2. Diduga dengan menerapkan sebuah perancangan sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam proses pengolahan data pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.
3. Diduga dengan menggunakan database MySQL data pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai sistem penyimpanan data dengan aman.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian dan penganalisaan ini terarah dan permasalahan yang di bahas tidak keluar dari topik pembahasan maka perlu adanya batasan ruang lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis membatasi penelitian dan penganalisaan ini antara lain :

1. Sistem informasi pengolahan data pegawai berbasis website.
2. Pengolahan data hanya dapat ditambahkan atau mengizinkan pembaharuan data jika masuk sebagai admin.
3. Pegawai hanya dapat melihat data kepegawaian dengan masuk sebagai pegawai pada sistem.
4. Data pegawai hanya dapat ditambahkan oleh admin sistem.

5. Pembuatan *website* pengolahan data ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk membangun sebuah sistem pengolahan data yang lebih fleksibel dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL serta dikelola secara online untuk mempermudah interaksi *user*.
2. Untuk membangun sistem yang mempermudah pegawai dalam pengaksesan informasi data kepegawaian yang sudah di inputkan sebelumnya dan dilakukan arsipitas pada MySQL *storage*.
3. Untuk Menghasilkan sistem pengolahan data pegawai yang menghemat waktu dan memungkinkan menghemat biaya serta *security* dilakukan *authenticated* pada akses login dengan perlindungan MD5 kata sandi.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Penulis
 - a. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan, melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, serta sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang *programming* dan teknologi informasi.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

- a. Dapat mempermudah dalam proses pengolahan data pegawai yang secara efektif dan efisien.
 - b. Dapat mengatasi kekurangan atau kelemahan yang ada pada sistem pengolahan data karyawan sebelumnya.
3. User atau Pegawai
- a. Dapat memberikan kemudahan pada user atau pegawai dalam proses pencarian data pegawai.
 - b. Dapat melakukan perubahan data dengan mudah.
4. Pihak lain
- diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

Pada tinjauan umum perusahaan akan dijelaskan sekilas tentang sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, struktur organisasi, dan pembagian tugas dari masing-masing bagian.

1.7.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Padang

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentaraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (PP) di Padang adalah lembaga yang diotorisasi melalui Walikota yang mana tertuang pada Perda Kota Padang nomor 71 tahun 2016. Sejarah Satpol PP Padang sudah terdapat pada UU nomor 22 tahun 1999 juga tercatat di pimpin oleh Bapak Andree Algamar pada

tahun 2010 kemudian di tahun berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Firdaus yang merubah struktural tugas dari Tipe B ke Tipe A pada inialisasi Eselon dan sekarang ketua Satpol PP Kota Padang yakni Mursalim, A,P, M.Si.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang merupakan penopang dalam pendukung lapangan Pemerintah Kota (Pemkot) terkhususnya regional Kota Padang, beberapa hal dalam tugas pokok yang dilakukan adalah seperti penanganan masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima.

Di tahun mendatang Satpol PP sendiri mengalami eskalasi perluasan yang baik dan secara teratur yang mana tercatat pada data aktual. Pada tahun 2018 tercatat 2491 kasus pelanggaran Peraturan Daerah telah ditangani oleh Satpol PP Kota Padang (Extise et al, 2021).

1.7.2 Visi dan Misi

Instansi memiliki cita-cita ideal sebagai *goal* atau tujuan bersama yang hendak dicapai. Sehingga menjadi acuan serta feedback yang jelas serta kontras sebagai nilai dan kepercayaan publik yang disebut visi dan misi.

1.7.2.1 Visi

Terwujudnya kehidupan Masyarakat Kota Padang yang tentram , tertib, sejahtera, religius dan berbudaya.

1.7.2.2 Misi

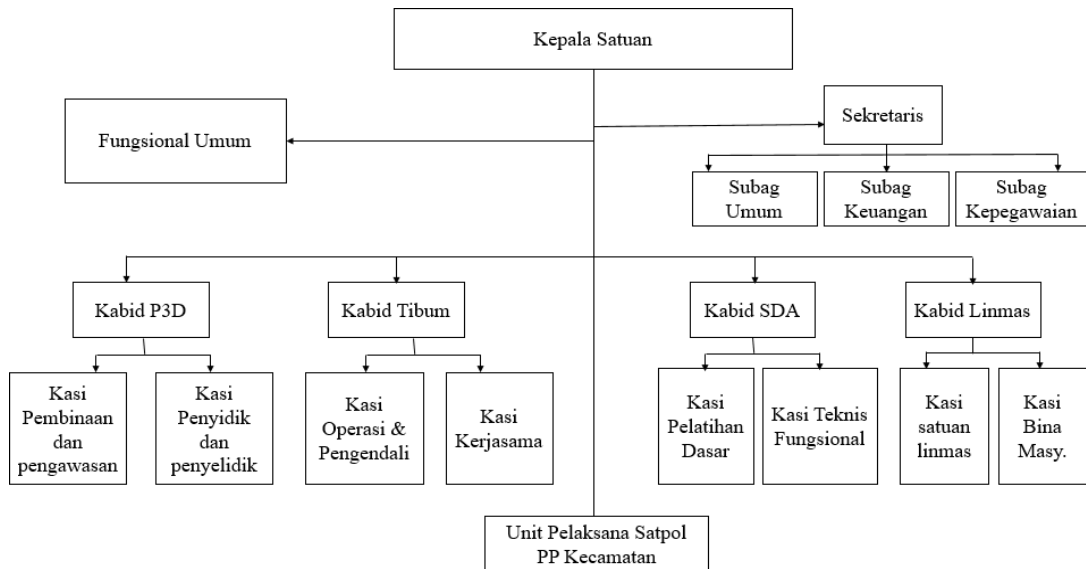
- a. Menegakkan hukum dan supremasi hukum yang adil serta menghormati hak azazi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang sejahtera.

- b. Memberikan jaminan kondisi aman, tertib, damai dan tentram untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat Kota Padang yang religius.
- c. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kehidupan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya sehingga memiliki masyarakat yang berbudaya.
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang dalam hal menangani masalah-masalah yang masuk ke dalam laporan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan dinas terkait dalam hal Penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah Kota Padang.
- f. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP.

1.7.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan berbagai komponen dan unit kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi dapat menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lain. Perubahan struktur organisasi sebagai salah satu usaha mencapai organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) dapat memberikan dampak bagi anggota organisasi (Suhendar, 2021).

Adapun bentuk struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang